

## IMPLEMENTASI *COMMUNITY BASED TOURISM* (CBT) DI DESA WISATA TINALAH KABUPATEN KULON PROGO

Ummy Rofingatun Khasanah, Dr. S. Agus Santosa, M. AP.

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas

Maret

email: [ummyrkha\\_11@student.uns.ac.id](mailto:ummyrkha_11@student.uns.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Tinalah. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan yaitu *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder didapat dari beberapa studi sebelumnya melalui buku, jurnal, dan berita. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik secara langsung yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengadopsi dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang dilakukan melalui beberapa tahap yaitu *data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi dari Richard Matland. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Tinalah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Namun, belum seluruh masyarakat tersebut tergabung dalam pengelolaan Desa Wisata Tinalah dikarenakan masih minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai desa wisata, dan belum semua masyarakat dapat merasakan dampaknya.

**Kata Kunci:** *Community Based Tourism* (CBT); Desa Wisata Tinalah; Implementasi Kebijakan

### Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of *Community Based Tourism* (CBT) in Tinalah Tourism Village. This research uses descriptive qualitative method with informant selection technique, namely *purposive sampling*. This study uses primary data was obtained through interviews and documentation, while secondary data was obtained from several previous studies through books, journals, and news. Data collection is done by direct technique which includes interviews and documentation. The data analysis technique in this study was adopted from Miles, Huberman and Saldana (2014) which was carried out through several stages, namely data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The theory used in this research is the implementation theory of Richard Matland. The results of this study indicate that the *Community Based Tourism* (CBT) policy in Tinalah Tourism Village is in accordance with applicable regulations and implemented by the competent authorities. However, not all of these communities have joined in the management of the Tinalah Tourism Village due to the lack of socialization and education about tourism villages, and not all communities can feel the impact.

**Keywords:** Community Based Tourism (CBT); Tinalah Tourism Village; Policy Implementation

## Pendahuluan

Interaksi dari berbagai stakeholder (*human environment*) dengan destinasi (*physical environment*) dan masyarakat lokal (*local community*) akan menghasilkan dampak. Dampak pariwisata lokal terbagi menjadi tiga lingkup yaitu dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Berdasarkan ketiga lingkup tersebut, mengakibatkan munculnya dampak positif dan negatif yang mana dalam hal ini dampak negatif banyak dirasakan oleh masyarakat lokal (*local community*) atau masyarakat yang menjadi tuan rumah dan/atau masyarakat yang berada di sekitar kawasan pariwisata. Masyarakat lokal sebagian besar hanya menjadi objek, sedangkan yang menjadi pengelola atau yang memiliki power yang lebih tinggi dalam pengelolaan dan pengembangan wisata adalah orang/kelompok di luar masyarakat lokal. Padahal dalam prinsip *Sustainable Tourism* atau pembangunan berkelanjutan mendorong adanya *balancing* antara destinasi dan masyarakat lokal, karena mau bagaimanapun *local community* memiliki hak lebih besar serta paling dekat dengan kawasan pariwisata tersebut. Hal itulah yang memunculkan adanya kebutuhan akan *Community Based Tourism* (wisata berbasis masyarakat) (Rachmawati, 2020). Pariwisata lokal berkaitan erat dengan kajian tentang masyarakat pedesaan. Diketahui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan mempunyai potensi dalam menarik wisatawan untuk turut serta mengunjungi desanya. Terkait hal tersebut, jika potensi desa wisata bisa dikelola dengan baik, maka dimungkinkan akan memberikan nilai tambah hampir ke semua aspek baik ekologis, sosial budaya, bahkan ekonomi yang akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat desa (Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020-2024). Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik mencatat ada 1.734 desa wisata di Indonesia yang mana posisi tertinggi ditempati oleh pulau Jawa dan Bali dengan jumlah mencapai 857 desa wisata (masterplandes, 2020).

**Tabel 1.1**  
**Data Desa Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Wisata
1	Kota Madya	27
2	Kabupaten Bantul	33
3	Kabupaten Sleman	38
4	Kabupaten Kulon Progo	10
5	Kabupaten Gunung Kidul	14

Sumber: Utantoro, 2018

Berdasarkan data tersebut, di pulau jawa khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut Sri Riyanto, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerangkan bahwa terdapat sedikitnya 122 desa wisata di DIY yang mana tersebar menjadi 38 di Kabupaten Sleman, 33 di Kabupaten Bantul, 27 di Kota Yogyakarta, 14 di Kabupaten Gunung Kidul, dan 10 desa wisata di Kabupaten Kulon Progo (Utantoro, 2018). Kabupaten Kulon Progo dengan 12 kecamatan di dalamnya menjadi salah satu kabupaten yang memiliki desa wisata paling sedikit diantara daerah lainnya. Meskipun Kulon Progo memiliki jumlah desa wisata yang sedikit, akan tetapi wilayah ini mempunyai destinasi desa wisata yang cukup populer, salah satunya yaitu Desa Wisata Tinalah (Dewi Tinalah). Tinalah merupakan satu-satunya desa wisata berbasis *Community Based Tourism* yang berada di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Ketetapan desa tersebut menjadi desa wisata terdapat dalam Keputusan Lurah Purwoharjo Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengukuhan Pendirian Desa Wisata Tinalah. Potensi wisata yang ditawarkan dalam desa tersebut yaitu diantaranya, atraksi budaya, camping, outbound, makrab, kuliner, studi banding desa wisata, pelatihan digital marketing, serta jelajah alam dan napak tilas sejarah (dewitinalah, 2021). Desa Wisata Tinalah dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tinalah yang mana tertuang dalam Keputusan Lurah Purwoharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tinalah Desa Purwoharjo Kecamatan Samigaluh. Desa Wisata Tinalah mempunyai cukup banyak potensi di dalamnya, akan tetapi berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 19 Juli 2021 di Desa Wisata Tinalah, pengelolaan pariwisata di desa ini memiliki beberapa permasalahan yaitu diantaranya terkait kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pariwisata dan sapa pesona di desa wisata tersebut, serta minimnya partisipasi masyarakat untuk

turut terlibat di dalam pengelolaan pariwisata yang mana diketahui saat ini pengelola paling banyak didominasi oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis) saja. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat 2(e) tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata yang berbunyi, “Deswita/Kawita ditetapkan dengan kriteria didukung peran serta masyarakat”, masih belum terimplementasi dengan baik. Menurut Edward III (1984), apabila suatu kebijakan tidak diimplementasikan dengan efektif maka dapat dikatakan keputusan yang telah dibuat oleh *policy maker* tidak berhasil dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan suatu implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang dikeluarkan di ranah publik melalui pengelolaan input untuk menghasilkan *outcomes* ataupun *output* bagi masyarakat setempat. Searah dengan pendapat tersebut, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suparno (2017) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah keterkaitan antara tujuan kebijakan dengan yang senyatanya direalisasikan di lapangan melalui suatu hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam konteks ini dapat ditekankan lebih lanjut bahwa keberadaan desa wisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Tinalah belum terealisasi dengan optimal mengingat masih kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat dan adanya beberapa permasalahan yang telah disebutkan di atas. Tentunya, keberadaan masalah partisipasi dalam pelaksanaan CBT tersebut sangat membutuhkan perhatian khusus mengingat keberadaan desa wisata juga selaras dengan tujuan SDGs Desa untuk mewujudkan desa yang tanpa kemiskinan (poin 1), desa tanpa kelaparan (poin 2), desa sehat dan sejahtera (poin 3), pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi (poin 8), dan kawasan pemukiman desa yang berkelanjutan (poin 11). Selaras dengan hal tersebut, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwasannya desa wisata dapat bertahan dan tetap eksis maka perlu diperhatikan beberapa hal yaitu diantaranya keterbukaan, transparansi, inovasi, prinsip keadilan, adaptasi, kolaborasi, dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dianggap cukup penting dan berperan besar dalam pengembangan dan pengelolaan di desa wisata (Wicaksono, 2021).

Berdasarkan pernyataan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana implementasi *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Tinalah Kabupaten Kulon Progo?” Sehingga dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat lebih dalam secara implementasi terkait pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Tinalah. Sehingga judul yang diambil dalam penelitian ini yaitu Implementasi *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Tinalah Kabupaten Kulon Progo.

Terkait hal itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kebijakan pada generasi ketiga dari Richard Matland (1995). Teori tersebut

menjelaskan tentang implementasi dari sudut pandang ketepatan implementasi kebijakan menurut Matland dalam Alamsyah (2016) yang terbagi menjadi empat ketepatan hal yang harus dipenuhi, yaitu:

**A. Ketepatan Kebijakan**

Ketepatan kebijakan dalam implementasi kebijakan dilihat dari sejauh mana suatu kebijakan mampu untuk memecahkan masalah yang akan diselesaikan. Dalam hal ini terkait dengan pertanyaan *how excellent is the policy?* Apakah kebijakan yang ada sesuai dengan karakteristik dari konflik yang akan diselesaikan ataukah belum? Selain itu juga dilihat, apakah kebijakan tersebut telah dibuat oleh lembaga atau organisasi yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan ciri khas dari kebijakan yang diimplementasikan?

**B. Ketepatan Pelaksanaan**

Pelaksana dalam suatu implementasi kebijakan publik ada tiga jenis yaitu pemerintah, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat/swasta, dan implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan-kebijakan yang sifatnya monopoli memiliki tingkat derajat politik keamanan yang tinggi sehingga seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Kemudian untuk kebijakan yang tujuannya untuk mengarahkan kegiatan masyarakat seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan kebijakan yang sifatnya memberdayakan masyarakat seperti dalam penelitian ini sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

**C. Ketepatan Target**

Ketepatan target berkaitan dengan pertanyaan apakah target yang dituju atau diintervensi sesuai dengan kebijakan yang direncanakan, apakah intervensi tersebut tidak tumpang tindih dengan intervensi lain?, apakah target yang diintervensi kondisinya sudah siap?, dan apakah intervensi dalam implementasi kebijakan sifatnya baru ataukah hanya memperbaiki implementasi kebijakan yang sudah ada sebelumnya? Hal tersebut penting untuk ditanyakan, terutama dalam poin terakhir karena banyak kebijakan yang kelihatannya baru, akan tetapi pada realitanya mengulang kebijakan yang pernah ada sebelumnya.

**D. Ketepatan Lingkungan**

Menurut Donald J. Calista lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu lingkungan endogen atau internal kebijakan dan eksogen atau eksternal kebijakan. Lingkungan endogen berkenaan dengan sumber kekuatan otoritas dari kebijakan (*authoritative arrangement*), komposisi jejaring dari organisasi atau lembaga yang terlibat (*network composition*), dan posisi tawar-menawar yang terjadi antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dengan jejaring yang berkenaan dengan implementasi

kebijakannya (*implementation setting*). Sedangkan lingkungan eksternal kebijakan terdiri dari persepsi publik terkait kebijakan serta implementasinya (*public opinion*), berkenaan dengan interpretasi dari berbagai lembaga strategis di masyarakat (*interpretive institution*), serta berkaitan dengan individu tertentu yang dapat berperan dalam proses penginterpretasian kebijakan (*individuals*).

## Metode

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui suatu kejadian, keadaan, fenomena tertentu dengan menyajikan apa yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2008), penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian namun tidak digunakan untuk menyimpulkan sesuatu yang lebih luas.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi pribadi oleh peneliti. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu diantaranya ada Keputusan Lurah Purwoharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tinalah Desa Purwoharjo Kecamatan Samigaluh; Keputusan Lurah Purwoharjo Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengukuhan Pendirian Desa Wisata Tinalah; Peta administrasi Desa Wisata Tinalah, Desa Purwoharjo; dokumentasi pelaksanaan CBT oleh Desa Wisata Tinalah; dan *E-book* Kamal Alamsyah tentang Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi (Teori Richard E. Matland). Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung (*field research*) yang meliputi wawancara (*interview*) dan dokumentasi (*documentation*). Sedangkan untuk teknik analisis datanya mengadopsi dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang menjelaskan bahwa teknik ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Deskripsi Lokasi

Dewi Tinalah atau Desa Wisata Tinalah berada di area Sungai Tinalah dan Pegunungan Menoreh. Desa wisata ini didirikan dengan mengusung konsep pengembangan pesona alam dan budaya. Lokasi Desa Wisata Tinalah yaitu di Jalan Persandian KM 5, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terkait aksesibilitas ke lokasi ini pengunjung dapat menempuh dengan berbagai jenis transportasi

baik kendaraan pribadi maupun umum. Jarak yang ditempuh menuju lokasi Dewi Tinalah juga cukup terjangkau misalnya dari Stasiun dan Kota Yogyakarta dapat ditempuh dengan jarak kurang lebih 25 KM, dari Stasiun Wates 20 KM, dan dari Bandara YIA (Yogyakarta International Airport) 23 KM. Selain itu jarak dari puskesmas dan praktik dokter pun dapat dijangkau dengan jarak 3-4 KM (Dinas Pariwisata Kulon Progo, 2017).

Berdasarkan informasi dari Statistik Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (2022), saat ini Jumlah penduduk Desa Purwoharjo adalah sebanyak 3.551 jiwa per tahun 2022 dengan jumlah penduduk laki-laki di Desa Purwoharjo adalah sebanyak 1.746 jiwa dan perempuan sebanyak 1.805 jiwa.

#### **B. Implementasi *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Kabupaten Kulon Progo**

Implementasi kebijakan ialah kegiatan yang dilaksanakan setelah pengarahannya resmi dari kebijakan yang meliputi upaya input guna menghasilkan output bagi masyarakat (Mulyadi, 2015:47). Implementasi kebijakan *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Tinalah ini tertuang dalam Keputusan Lurah Purwoharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tinalah Desa Purwoharjo Kecamatan Samigaluh; dan Keputusan Lurah Purwoharjo Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengukuhan Pendirian Desa Wisata Tinalah. Dalam penelitian ini implementasi kebijakan *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Tinalah dikaji lebih lanjut menggunakan sudut pandang dari teori implementasi kebijakan dari Richard Matland dalam Alamsyah (2016) yang meliputi ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan sebagai berikut:

### 1) Ketepatan Kebijakan

Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Suparno (2017), implementasi kebijakan merupakan suatu interaksi antara beberapa tujuan dengan sarana yang tersedia, tindakan untuk mencapai tujuan, atau dapat diartikan sebagai langkah untuk menghubungkan antara tujuan yang diinginkan dengan realisasinya. Richard Matland dalam Alamsyah (2016) menjelaskan bahwa Implementasi dari suatu kebijakan tersebut dapat diketahui dari aspek ketepatan kebijakannya. Ketepatan kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Berdasarkan pembahasan di atas, ketepatan kebijakan dalam implementasi *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Tinalah Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan dengan baik atau dengan kata lain sudah tepat dilaksanakan.

Hal tersebut ditunjukkan dalam komponen “*how excellent is the policy?*” bahwa dalam implementasi kebijakan ini seluruh masyarakat lokal yang ada di sekitar Desa Wisata Tinalah diperbolehkan untuk bergabung menjadi pengelola desa wisata tanpa batasan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait hal tersebut, aktivitas pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Tinalah ini cukup beragam yaitu diantaranya ada pelatihan dan pendidikan wirausaha muda desa wisata di bidang UMKM, serta beberapa pelatihan untuk mengasah kemampuan masyarakat di bidang kesenian baik seni lukis, seni musik, dan seni tari seperti pada gambar berikut ini:

**Gambar 4.1**  
**Pelatihan dan Pendidikan Wirausaha Muda Desa Wisata**



Sumber: *Website Resmi Desa Wisata Tinalah, 2021*



**Gambar 4.2**  
**Pelatihan Pembuatan Topi Anyam**



Sumber: *Website Resmi Desa Wisata Tinalah, 2021*

Keberhasilan ketepatan kebijakan ini juga ditunjukkan dari adanya kebijakan yang sudah sesuai dengan karakteristik dari masalah yang hendak dipecahkan. Karakteristik masalah yang ada di Desa Wisata Tinalah saat itu adalah masyarakatnya belum mempunyai wawasan yang cukup luas mengenai aktivitas wisata serta membutuhkan ruang gerak untuk berkarya, sedangkan potensi di wilayah tersebut sangat mendukung untuk dilakukannya aktivitas wisata alam. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan ini masyarakat dapat mempunyai aktivitas yang produktif melalui beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Wisata Tinalah.

Selain itu, keberadaan kebijakan *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Tinalah ini sudah dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ciri khas dari kebijakan yang diimplementasikan. Lembaga tersebut yaitu Pemerintah Desa Purwoharjo yang dalam keberjalanannya tetap melibatkan dari unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

## 2) **Ketepatan Pelaksanaan**

Menurut Van Horn dan Van Meter dalam Suparno (2017), implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Richard Matland dalam Alamsyah (2016) menjelaskan bahwa Implementasi dari suatu kebijakan dapat diketahui dari aspek ketepatan pelaksanaannya. Terkait hal tersebut, ketepatan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan di Desa Wisata Tinalah ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan bahwa di dalam implementasi kebijakan

*Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Tinalah ini sudah terdapat pihak pemerintah, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat/swasta, serta implementasi kebijakan yang diswastakan.

Unsur dari pihak pemerintah tersebut yaitu berasal dari Pemerintah Desa Purwoharjo, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian, terkait kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat/swasta ini ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan beberapa bentuk pemberdayaan masyarakat yaitu diantaranya dalam hal pengembangan UMKM yang bekerja sama dengan instansi koperasi dan UKM di tingkat pusat maupun daerah, serta pelatihan dalam pemanfaatan teknologi informasi oleh instansi komunikasi dan informasi di tingkat pusat maupun daerah seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut:

**Gambar 4.3**

**BIMTEK dan Fasilitasi P-IRT UMKM Se-DIY**



Sumber: Akun Instagram Diskop UKM DIY, 2020

**Gambar 4.4**

**Pelatihan Teknologi Informasi bagi Pengelola Desa Wisata**



Sumber: Dokumentasi Pribadi Ketua Desa Wisata Tinalah, 2021

Terkait implementasi kebijakan yang diswastakan di Desa Wisata Tinalah ini juga sudah berjalan, hal tersebut ditunjukkan bahwa pemerintah desa melalui BUMDes sudah masuk menjadi bagian pengelolaan Desa Wisata Tinalah. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan dan strategi pun

dilakukan secara birokrat, serta dalam aktivitas kunjungan wisata sudah ada kebijakan yang harus disepakati antara pengunjung dan pengelola Desa Wisata Tinalah. Selain itu, implementasi kebijakan yang diswastakan ini dapat dilihat dari adanya beberapa pihak swasta yang terlibat di dalamnya yaitu diantaranya Novantara, *Viavia Tour and Travel*, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pemandu wisata lokal.

### 3) **Ketepatan Target**

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan maka harus sesuai antara kebijakan yang dibuat dengan kelompok sasaran yang dituju atau dengan kata lain ada unsur ketepatan target di dalamnya. Ketepatan target dalam implementasi kebijakan *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Tinalah ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa komponen yang pelaksanaannya belum maksimal.

Terkait hal ini, keberadaan *Community Based Tourism* (CBT) menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pada kegiatan pariwisata yang mana dalam hal ini Desa Wisata Tinalah sudah dikelola oleh masyarakat lokal yang berada di sekitar desa wisata. Itu artinya, target yang diintervensi sudah sesuai dengan kebijakan yang direncanakan. Namun, belum seluruh target atau masyarakat tersebut tergabung dalam pengelolaan Desa Wisata Tinalah. Menurut informasi dari Statistik Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (2022), saat ini jumlah penduduk yang ada Desa Purwoharjo adalah sebanyak 3.551 jiwa per tahun 2022. Namun, masyarakat yang tergabung di dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Tinalah masih tergolong sedikit yaitu hanya 45 jiwa. Hal ini dapat diartikan bahwa target yang diintervensi kondisinya belum cukup siap. Masyarakat belum cukup siap dengan kebijakan yang ada dikarenakan masih minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai desa wisata. Tentunya, ini berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat terutama tentang arah dan manfaat yang diterima dari adanya kebijakan *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Tinalah ini. Di sisi lain, terkait Pengembangan sumber daya manusia bagi pengelola desa wisata sendiri sudah cukup berjalan, namun masih perlu dioptimalkan kembali. Aspek ketepatan target ini juga dapat dilihat dari sifat intervensi implementasi kebijakan yang diterapkan. Hal ini penting untuk ditanyakan karena banyak kebijakan yang kelihatannya baru, akan tetapi pada kenyataannya mengulang kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Terkait hal tersebut, di Desa Wisata Tinalah sendiri kebijakan *Community Based Tourism* (CBT) ini masih bersifat baru karena sebelumnya di wilayah ini

belum ada pemberdayaan masyarakat. Saat itu wilayahnya masih dalam bentuk sungai dan hamparan daratan yang cukup luas, sehingga saat itu belum dialihfungsikan menjadi lahan untuk destinasi desa wisata.

#### 4) **Ketepatan Lingkungan**

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan didukung oleh adaptabilitas atau kemampuan beradaptasi dari lingkungan implementasi kebijakan itu sendiri. Lingkungan tersebut terbagi menjadi dua yaitu lingkungan endogen atau internal dan lingkungan eksogen atau eksternal kebijakan. Dalam implementasi kebijakan *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Tinalah di lingkungan endogen ini sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya sumber kekuatan otoritas dari kebijakan yang dibuat yaitu berasal dari rapat pemegang saham serta kelompok sadar wisata (pokdarwis) Tinalah. Kemudian terkait komposisi jejaring dari organisasi atau lembaga yang terlibat di dalam implementasi kebijakan ini diwujudkan dengan keterlibatan berbagai unsur organisasi/lembaga yaitu diantaranya pihak bisnis, pemerintah, media, komunitas, dan akademisi. Lalu, untuk otoritas yang mengeluarkan kebijakan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Purwoharjo, sedangkan jejaring dalam kegiatan tawar-menawar dilakukan oleh Desa Wisata Tinalah dengan kelompok sadar wisata (pokdarwis) maupun dengan Pemerintah Desa Purwoharjo.

Namun, dalam implementasi kebijakan *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Tinalah di lingkungan eksogen belum cukup berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya persepsi publik bahwa masyarakat berharap supaya keberadaan Desa Wisata Tinalah dapat berdampak positif ke masyarakat luas. Akan tetapi, pada realitanya, imbas positif tersebut baru dirasakan oleh masyarakat yang mengelola desa wisata saja. Selain itu, terkait interpretasi lembaga strategis masyarakat yang ada di Desa Wisata Tinalah ini terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kalyana Mitra ini belum berjalan dengan maksimal karena programnya masih umum dan belum berfokus pada ranah pariwisata. Mengenai individu-individu yang berperan dalam proses pengintegrasian kebijakan ini berasal dari beberapa donatur. Meskipun demikian, keberadaan donatur tersebut masih tergolong sedikit serta belum cukup berdampak luas bagi Desa Wisata Tinalah.

## **Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas, implementasi *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Tinalah Kabupaten Kulon Progo yang dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan dari Richard Matland, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 4 (empat) ketepatan, 2 (dua) diantaranya belum berjalan dengan baik. Ketepatan yang sudah berjalan tersebut yaitu ketepatan kebijakan dan ketepatan pelaksanaan, sedangkan 2 (dua) ketepatan yang belum cukup berhasil yaitu ketepatan target dan ketepatan lingkungan.

Ketepatan kebijakan dalam implementasi *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Tinalah sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dalam komponen “*how excellent is the policy?*” bahwa dalam implementasi kebijakan ini seluruh masyarakat lokal yang ada di sekitar Desa Wisata Tinalah diperbolehkan untuk bergabung menjadi pengelola desa wisata sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta sudah ada beberapa pelatihan untuk mengasah kemampuan masyarakat di bidang UMKM dan kesenian. Keberhasilan ketepatan kebijakan ini juga ditunjukkan dari adanya kebijakan yang sudah sesuai dengan karakteristik dari konflik yang hendak diselesaikan. Selain itu, kebijakan ini sudah dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ciri khas dari kebijakan yang diimplementasikan yaitu Pemerintah Desa Purwoharjo yang dalam keberjalanannya tetap melibatkan dari unsur pemerintah daerah dan pusat. Ketepatan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan di Desa Wisata Tinalah ini sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan di dalam implementasi kebijakan *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Tinalah ini sudah terdapat unsur dari pihak pemerintah yaitu berasal dari Pemerintah Desa Purwoharjo, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian, terkait kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat/swasta ini ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan beberapa bentuk pemberdayaan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Terkait implementasi kebijakan yang diswastakan di Desa Wisata Tinalah ini ditunjukkan bahwa BUMDes sudah masuk menjadi bagian pengelolaan Desa Wisata Tinalah. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan dan strategi pun dilakukan secara birokrat, serta dalam aktivitas kunjungan wisata sudah ada kebijakan yang harus disepakati antara pengunjung dan pengelola Desa Wisata Tinalah.

Ketepatan target dalam implementasi kebijakan *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Tinalah ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Terkait hal ini, Desa Wisata Tinalah sudah dikelola oleh masyarakat lokal yang berada di sekitar desa wisata. Namun, belum seluruh masyarakat tersebut

tergabung dalam pengelolaan Desa Wisata Tinalah. Hal ini dapat diartikan bahwa target yang diintervensi kondisinya belum cukup siap dikarenakan masih minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai desa wisata. Di sisi lain, terkait pengembangan sumber daya manusia bagi pengelola desa wisata sendiri sudah cukup berjalan, namun masih perlu dioptimalkan kembali. Aspek ketepatan target ini juga dapat dilihat dari sifat intervensi implementasi kebijakan yang diterapkan bahwa kebijakan *Community Based Tourism* (CBT) ini masih bersifat baru. Ketepatan lingkungan endogen ini sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya sumber kekuatan otoritas dari kebijakan yang dibuat yaitu berasal dari rapat pemegang saham serta kelompok sadar wisata (pokdarwis) Tinalah. Kemudian terkait komposisi jejaring dari organisasi/lembaga yang terlibat di dalam implementasi kebijakan ini diwujudkan dengan keterlibatan berbagai unsur bisnis, pemerintah, media, akademisi, dan komunitas. Lalu, untuk otoritas yang mengeluarkan kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Purwoharjo, sedangkan jejaring dalam kegiatan tawar-menawar dilakukan oleh Desa Wisata Tinalah dengan kelompok sadar wisata (pokdarwis) maupun dengan Pemerintah Desa Purwoharjo. Namun, dalam implementasi kebijakan *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Tinalah di lingkungan eksogen belum cukup berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya persepsi publik bahwa masyarakat berharap supaya keberadaan Desa Wisata Tinalah dapat berdampak positif ke masyarakat luas. Tetapi pada realitanya, imbas positif tersebut baru dirasakan oleh masyarakat yang mengelola desa wisata saja. Terkait interpersi lembaga strategis masyarakat yang ada di Desa Wisata Tinalah ini terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kalyana Mitra ini belum berjalan dengan maksimal karena programnya masih umum dan belum berfokus pada ranah pariwisata. Mengenai individu-individu yang berperan dalam proses pengintegrasian kebijakan ini berasal dari beberapa donatur. Meskipun demikian, keberadaan donatur tersebut masih tergolong sedikit serta belum cukup berdampak besar bagi Desa Wisata Tinalah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Tinalah Kabupaten Kulon Progo ini, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

### **1) Saran Bagi Pemerintah Desa dan Desa Wisata**

- a. Perlu adanya agenda pameran pariwisata yang diselenggarakan secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali, misalnya dalam peringatan hari desa wisata Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya berbagai produk dan atraksi di Desa Wisata Tinalah dapat dikenal oleh

masyarakat secara luas dan secara tidak langsung banyak masyarakat yang turut mendukung pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di desa wisata ini;

- b. Perlu adanya survei tahunan yang dilakukan secara rutin dengan tujuan untuk memantau sejauh mana perkembangan dari *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Tinalah.
- c. Perlu adanya kegiatan sosialisasi kepariwisataan kepada masyarakat di sekitar Desa Wisata Tinalah yang dilakukan secara berkala minimal selama 1 (satu) tahun sekali. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan pandangan, visi dan misi dari Desa Wisata Tinalah antara masyarakat, pengelola desa wisata, dan pemerintah. Selain itu, tujuan dari sosialisasi ini dapat menjadi tempat untuk menyalurkan program-program Desa Wisata Tinalah kepada masyarakat luas. Dengan demikian, melalui kegiatan tersebut masyarakat dapat lebih paham tentang Desa Wisata Tinalah dan siap berkontribusi di dalamnya;
- d. Perlu adanya manajemen sanggar seni budaya di Desa Wisata Tinalah supaya kegiatan tersebut dapat lebih terkelola dengan baik;
- e. Dikarenakan dalam pelaksanaan beberapa pelatihan masih didominasi oleh Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) Tinalah, maka sebaiknya masyarakat umum juga diberikan ruang gerak untuk berkontribusi dalam kegiatan pelatihan tersebut;

## 2) Saran Bagi Masyarakat

- a. Sebaiknya masyarakat lebih terbuka dalam mengikuti sosialisasi secara intensif yang diadakan oleh desa wisata maupun pemerintah. Hal ini dimaksudkan supaya pemahaman dan wawasan masyarakat tentang desa wisata dapat meningkat dan terjadi keseragaman sudut pandang antara masyarakat, desa wisata, dan pemerintah mengenai kegiatan wisata di Desa Wisata Tinalah;
- b. Perlu adanya kesadaran gotong royong untuk bekerja sama guna menjaga dan mengelola destinasi di Desa Wisata Tinalah.

## Referensi

Akun Instagram Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kulon Progo dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2022. *BIMTEK dan Fasilitas P-IRT UMKM Se-DIY*. [instagram.com/diskopukm.diy/](https://www.instagram.com/diskopukm.diy/). Diakses pada 28 Mei 2022.

Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Jumlah Devisa Sektor Pariwisata, Badan Pusat Statistik*,  
<https://bps.go.id/indikator/indikator/viewdata/0000/data/160/sdgs8/1>.  
Diakses pada 22 Mei 2021.
- Desa Wisata Tinalah. 2020. *Pemuda Desa Wisata Tinalah Ikuti Pelatihan dan Pendidikan Wirausaha Muda Desa Wisata dari Kemenparekraf*.  
<https://www.dewitinalah.com/2020/11/pelatihan-wirausaha-desawisata.html>. Diakses pada tanggal 6 Mei 2022.
- Keputusan Lurah Purwoharjo Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengukuhan Pendirian Desa Wisata Tinalah.
- Keputusan Lurah Purwoharjo Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tinalah Desa Purwoharjo.
- Kompas. 2021. *Desa Wisata Jadi Program Unggulan Kemenparekraf*,  
[https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/travel/read/202/03/27/08\\_0800927/desa-wisata-jadi-program-unggulan-kemenparekraf](https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/travel/read/202/03/27/08_0800927/desa-wisata-jadi-program-unggulan-kemenparekraf), diakses  
diakses pada 22 Mei 2021.
- Masterplandes. 2020. *Desa Wisata Menjawab Tren Wisata Alternatif*.  
<https://www.masterplandes.com/wisata/desa-wisata-menjawab-tren-wisata-alternatif/>. Diakses pada 2 Agustus 2021.
- Miles, B. Mathew, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Qualitative Data Analys: A Methods Sourcebook*. SAGE Publication.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata.
- Rachmawati, E. 2020. *Community based Tourism - DKSHE Fahutan IPB*. 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=ZKZb-1n1r68>. Diakses pada 2 Agustus 2021.
- Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024.
- Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*. Semarang: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Utantoro, A. 2018. *Desa Wisata Masih Jadi Andalan Pariwisata DIY*.  
<https://mediaindonesia.com/nusantara/66959/desa-wisata-masih-jadi-andalan-pariwisata-diy>. Diakses pada 1 Agustus 2021.
- Website Resmi Desa Wisata Tinalah. 2021. *Desa Wisata Tinalah*.  
<https://www.dewitinalah.com/>. Diakses pada 2 Agustus 2021.
- Wicaksono, P. 2021. *Sandiaga Uno Sebut 7 Syarat agar Desa Wisata Tetap Eksis*.  
<https://www.google.com/amp/s/travel.co/amp/1469329/sandiaga-uno-sebut-7-syarat-agar-desa-wisata-tetap-eksis>. Diakses pada 9 Juni 2021.